

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	09
1.3 Metode Penelitian.....	09
1.3.1 Tipe Penelitian.....	09
1.3.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.3.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	11
1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11

BAB II	KUALIFIKASI PERBUATAN KORBAN HIPNOTIS SEBAGAI TINDAK PIDANA.....	12
2.1	Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya .....	12
2.2	Perbuatan Korban Hipnotis Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana.....	31
2.2.1	Pengertian Hipnotis .....	31
2.2.2	Macam-Macam Hipnotis .....	34
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN HIPNOTIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA .....	44
3.1	Pertanggungjawaban Pidana.....	44
3.1.1	Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	44
3.1.2	Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Cara Hipnotis.....	57
BAB IV	PENUTUP .....	61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	62
DAFTAR BACAAN		

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)